

Bidang Fokus Penelitian: Sosial Humaniora

**LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**



JUDUL PENELITIAN:

***POLITICAL WILL* PEMBUAT KEBIJAKAN DAERAH DALAM
PENANGANAN MASALAH PANDEMI COVID 19 DI JAWA TIMUR**

TIM PENGUSUL:

Maya Mustika Kartika Sari, S. Sos. M.IP.	0014057403
Prof. Warsono, M.S	0019056003
Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	0025086704
Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si	0016087208

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
OKTOBER 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KEBIJAKAN FISH**

Judul Penelitian	: <i>Political Will</i> Pembuat Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Masalah Pandemi Covid 19 di Jawa Timur.
Kode>Nama Rumpun Ilmu	: 601 / Ilmu Sosial dan Politik
Bidang Fokus Penelitian	: Sosial Humaniora
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos, M.IP
b. NIDN	: 0014057403
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
e. Nomor HP	: 081332207020
f. Alamat surel (e-mail)	: mayamustika@unesa.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Prof. Warsono, M.S
b. NIDN	: 0019056003
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Surabaya
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si
b. NIDN	: 0025086704
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Surabaya
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap	: Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si
b. NIDN	: 0016087208
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Surabaya
Institusi Mitra	
a. Nama Institusi Mitra	:
b. Alamat	:
c. Penanggung Jawab	:
Lama Penelitian Kesehuruhan	: 3 Bulan
Usulan Penelitian Tahun ke-	:
Biaya Penelitian Kesehuruhan	: Rp 7.500.000,-
Biaya Penelitian	:
- diusulkan ke LPPM UNESA	: Rp
- dana institusi mitra	: Rp / in kind tuliskan: (jika ada)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

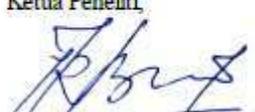


Dr. Erik Suyanto, MPd
NIP. 196704041988121001



Surabaya, 30 Oktober 2020

Ketua Peneliti



Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., MIP
NIP. 197405142003122002

Mengetujui



Prof. Es. Darli, M.Hum.
NIP. 195509031950022001



RINGKASAN

Respon secara politis terhadap masalah pandemic covid merupakan hal yang tidak bisa dihindari karena berimplikasi pada semua elemen kehidupan. Politik merupakan struktur dominan yang memiliki legitimasi untuk mengatur sistem sosial lainnya melalui kebijakan-kebijakan politik. Kebijakan terkait penanganan pandemi covid 19 terefleksi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, tidak menurunkan penyebaran corona di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana *political will* pembuat kebijakan di Jawa Timur. Komitmen para pemimpin politik dan birokrat untuk melakukan tindakan untuk mencapai serangkaian tujuan dan untuk mempertahankan biaya dari tindakan tersebut dari waktu ke waktu, merupakan fokus yang dikaji di dalam penelitian. Bencana pandemi covid 19 merupakan konteks sosial yang melingkupi para pembuat kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka/dokumentasi dengan teknik analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political will* pembuat kebijakan dalam penanganan covid 19 di provinsi Jawa timur menunjukkan kurang adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota hal. Pemerintah provinsi cenderung memandang bahwa tugas provinsi adalah tugas koordinatif, sedangkan tugas pemerintah kabupaten/kota adalah eksekutor dalam hal perumusan kebijakan maupun pelaksanaan. Sinergitas dalam hal kehendak bersama tidak dengan cepat dapat diwujudkan karena adanya perbedaan dalam Konstruksi Pengetahuan Kedaruratan Covid 19, Konsistensi Penanganan Kedaruratan Covid, dan Dukungan Politik dalam Penanganan Kedaruratan Covid 19.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kegiatan penelitian dan laporan penelitian yang berjudul *Political Will* Pembuat Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Masalah Pandemi Covid 19 di Jawa Timur. dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan Penelitian ini dapat dilaksanakan berkat dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Jajaran dekanat, Ketua Lembaga Penelitian UNESA beserta staff, yang telah memberikan dukungan sarana, prasarana, dan bantuan pengelolaan administrasi.
2. Para Mahasiswa yang bersedia menjadi bagian dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan dan laporan kemajuan penelitian ini, karena itu kami membutuhkan kritik dan saran bagi penyempurnaannya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Surabaya,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
BAB 1. PENDAHULUAN	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
BAB 4. METODE PENELITIAN	14
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI	17
BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN	32
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa pandemi covid 19 telah menjadi isu global. Dalam perkembangannya, virus covid 19 tidak lagi menjadi masalah kesehatan, namun telah berubah menjadi masalah politik, baik dalam skala internasional, nasional, dan bahkan di tingkat lokal. Respon secara politis terhadap masalah pandemic covid merupakan hal yang tidak bisa dihindari karena politik merupakan struktur dominan yang memiliki legitimasi untuk mengatur sistem-sistem yang lain melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Di Indonesia, kebijakan terkait penanganan pandemi covid 19 terefleksi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Pemerintah Pusat, sejak bulan Maret 2020, telah mengeluarkan beberapa regulasi dalam menangani masalah panemi covid 19 yaitu : (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan (3) Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Hal tersebut memicu berbagai kebijakan pemerintah di tingkat kementerian, daerah (provinsi, kabupaten/kota), bahkan ditingkat desa maupun RT/RW yang mendorong “maraknya” kebijakan penanganan pandemi dalam skala lokal.

Ketahanan sosial penanganan pandemi ini sangat bergantung pada komitmen politik untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengelola dan mengurangi risiko dan kerentanan bencana dan membangun ketahanan. Kurangnya komitmen politik pemangku kebijakan dapat menjadi penyebab terhambatnya prioritas tindakan ke arah mitigasi bahaya dan mengurangi risiko dalam jangka pendek dan jangka panjang [1]. Untuk itu pengkajian tentang political will merupakan sarana dalam mengembangkan sinergitas diantara para pembuat kebijakan di semua level kepemimpinan publik, guna

mengagregasikan nilai dan moral dasar dalam optimalisasi berbagai sektor dalam penanganan pandemi.

Wilayah Propinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang masif dalam penyebaran pandemi. Berita yang dilansir Tribun news menyebutkan bahwa Jawa Timur mencatat penambahan PDP (pasien dalam pemantauan) tertinggi melampaui DKI Jakarta [2]. Penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ditetapkan oleh gubernur Jawa Timur, tidak menurunkan penyebaran corona di wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut dapat diasumsikan kemungkinan terjadi dissinergitas diantara pemangku kebijakan di Jawa Timur, khususnya terkait penerapan PSBB. Kegagalan untuk menerapkan perubahan, umumnya dianggap sebagai manifestasi dari kurangnya kehendak politik (*politcal will*) pemangku kebijakan [3].

B. Permasalahan

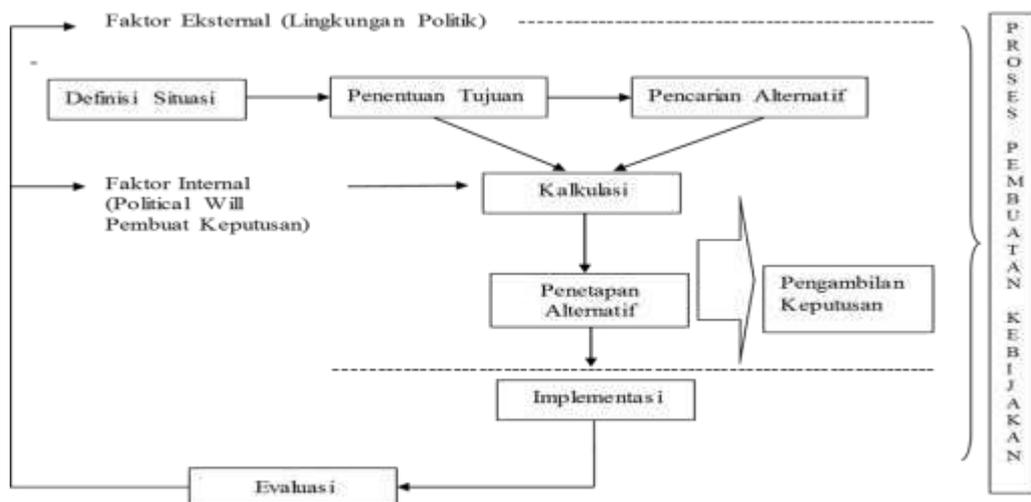
Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kehendak politik pembuat kebijakan daerah di Jawa Timur dalam memaknai kedaruratan kesehatan?
2. Bagaimana komitmen politik pembuat kebijakan daerah di Jawa Timur dalam menangani pandemi covid 19?

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. *Political Will* dalam Kebijakan Publik

Dalam pembahasan tentang keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan istilah *political will* (dapat diartikan kemauan atau kehendak politik) sering dikemukakan sebagai hal yang menentukan ada atau tidak adanya kebijakan, atau hal yang mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Walaupun seringkali tidak jelas apa arti istilah ini. Kehendak politik umumnya digunakan sebagai konsep *catch-all*, yang artinya sangat samar sehingga tidak banyak memperkaya pemahaman kita tentang proses politik dan kebijakan. Secara sederhana, kamus politik Oxford mendefinisikan kemauan politik sebagai niat atau komitmen tegas pemerintah untuk melaksanakan kebijakan, terutama kebijakan yang tidak segera berhasil atau populer[4]. Sedangkan Brinkerhoff mengartikan *Political Will* sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang [5]. Kemauan politik bukanlah semacam kualitas pribadi yang abadi dan bawaan. Itu tidak sama dengan keberanian atau keyakinan politik. Ini adalah konstruksi sosial yang disengaja, dan setiap kemajuan positif dari kebijakan publik bergantung pada keberhasilannya. Hal tersebut dapat dikerangkakan dalam gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Political Will dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah seperangkat keputusan oleh pemerintah dan aktor politik lainnya untuk mempengaruhi, mengubah, atau meringkai masalah atau masalah yang telah diakui sebagai ranah politik oleh pembuat kebijakan dan / atau masyarakat luas [6]. Kebijakan publik mencakup secara langsung atau tidak langsung membuat penilaian etis. Keputusan diambil terutama oleh pembuat kebijakan melalui seleksi dan rekonsiliasi kepentingan yang diwakili oleh individu, kelompok, dan organisasi. Kebijakan publik didasarkan pada keseimbangan nilai individu dan sosial. Dari nilai tersebut muncul tujuan, prinsip, dan gaya implementasi dan intervensi kebijakan. Semua pilihan dan keputusan dalam kebijakan publik pada setiap tahap siklus kebijakan adalah penilaian etis karena mereka mengandaikan bahwa beberapa hal lebih penting daripada yang lain, bahwa beberapa tindakan akan memiliki positif dan lainnya akan berdampak negatif pada masyarakat.

Pembuatan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, telah menjadi lebih kompleks dengan melibatkan kelompok-kelompok kepentingan yang lebih luas dan kurang dapat diprediksi termasuk organisasi masyarakat sipil. Pemerintah nasional juga semakin tunduk pada tekanan eksternal dan trans-nasional tidak hanya dari perusahaan trans-nasional, tetapi juga dari masyarakat sipil global yang muncul. Meskipun ada pergeseran yang diidentifikasi secara luas antar pemerintahan, penting untuk tetap memiliki perspektif. Sementara kekuatan tanpa batas dari banyak negara bangsa telah berkurang secara signifikan, negara tetap berpengaruh dalam memprakarsai, menyusun dan mengelola hubungan antara pemerintah dan aktor masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah. Akibatnya, praktisi kesehatan masyarakat dan advokat perlu menjadi ahli dalam keterampilan politik analisis pemangku kepentingan dan mengembangkan aliansi strategis dengan pejabat pemerintah, kelompok profesional, organisasi masyarakat sipil, donor dan komunitas penelitian jika mereka ingin kebijakan mereka diambil dan diimplementasikan. Situasi tersebut terefleksi dalam konteks pembuatan kebijakan politik pada masa pandemi covid 19 saat ini. Pengkajian political will dalam penanganan pandemi sejatinya merefleksikan kesiapan individual dan struktural dari aparatur negara dalam melakukan tindakan politik dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama.

B. Dimensi *Political Will*

Political will atau kemauan politik umumnya didefinisikan sebagai niat kredibel yang ditunjukkan oleh aktor-aktor politik [7]. Definisi yang lebih rinci dan berorientasi operasional dari konsep ini adalah komitmen para pemimpin politik dan birokrat untuk melakukan tindakan untuk mencapai serangkaian tujuan dan untuk mempertahankan biaya dari tindakan tersebut dari waktu ke waktu [8]. Konsepsi tersebut menunjukkan kompleksitas konsep kemauan politik, yang melibatkan banyak dimensi dan mencerminkan sejumlah besar faktor yang mendasarinya. Kemauan politik hampir tidak dapat diamati secara terpisah dari tindakan yang didukungnya, sehingga sulit untuk diukur secara langsung. Craig Charney (2009) menyatakan bahwa, “*Political will is the ghost in the machine of politics, the motive force that generates political action*” [9]. Berdasarkan pengertian tersebut maka sejumlah tindakan politik yang terlihat dapat diasumsikan sebagai kehendak atau kemauan politik. Dengan demikian *Political will* dapat didefinisikan sebagai tekad dan komitmen aktor politik individu untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki beberapa implikasi penting.

Definisi ini memiliki beberapa implikasi penting karena menghilangkan sejumlah hal. Ketidakmampuan instrumen politik atau administratif untuk mencapai hasil tidak termasuk. Begitu juga kekurangan sumber daya material. Demikian juga hambatan (atau lainnya) institusional dan oposisi dari kelompok kepentingan yang dapat mencegah hasil yang diinginkan terjadi. Kekuatan atau kelemahan dari tekad aktor politik individu kadang-kadang dapat menjelaskan suatu hasil, tetapi biasanya jauh lebih rumit. Hasil politik *hampir* selalu bersifat multi-kausal, dan harus menghindari praktik umum termasuk banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan tekad pemimpin. Ini menyiratkan bahwa kita perlu menempatkan 'kemauan politik' dalam sejumlah fitur lain dari sistem politik tertentu jika kita ingin memahami apa yang telah terjadi

Derick dan Brinkerhoff mengemukakan beberapa aspek yang berkaitan dengan *political will* [10], yaitu:

- a. Inisiatif pemerintah, berkaitan dengan konseptualisasi, penilaian, dan nilai moral yang mendasari tindakan politik.

- b. Derajat Prioritas. Berkaitan dengan pengkajian mendalam dan empiris dalam menentukan prioritas utama dalam tindakan politik.
- c. Usaha dalam memobilisasi, dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan dalam memaksimalkan dukungan dan mengurangi tuntutan.
- d. Pengalokasian sumber daya, terkait alokasi biaya dan pengawasannya.
- e. Pengaplikasian sanksi secara kredibel, berkaitan dengan konsistensi dan integritas.
- f. Belajar dan beradaptasi, berkaitan dengan konsistensi terhadap tujuan sesuai dengan konteks perubahan yang terjadi.

C. Road Map Penelitian

Kerangka penelitian disusun berdasarkan road map penelitian yang mengkaji bidang sosial politik dengan tujuan akhir adalah moral demokratis warga negara. Kajian yang dilakukan meliputi dua aspek dimensi ruang, yaitu ruang negara (suprastruktur) dan ruang publik (infrastruktur). Sasaran penelitian selaras dengan Rencana Induk Penelitian program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan politik dan pembangunan demokrasi. Gambar 2. Dapat memberikan gambaran dari road map penelitian.



Gambar 2. Road Map Penelitian

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian adalah mengkaji beberapa aspek yang mempengaruhi political will pembuat kebijakan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi, mekanisme kerja, dan orientasi pembuat kebijakan daerah Jawa timur dalam merespon masalah pandemi covid.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur komitmen pembuat kebijakan daerah di Jawa Timur dalam menangani pandemi covid 19 secara integratif.

B. Manfaat penelitian

Dengan mengetahui political will para pembuat kebijakan daerah maka urgensi dari penelitian adalah dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan monograf tentang strategi membangun political will dalam kebencanaan. Hal tersebut selaras dengan moto Unesa untuk unggul di bidang pendidikan, dalam hal ini pendidikan bagi para pembuat kebijakan.

Luaran yang dari hasil penelitian adalah berupa Artikel Ilmiah yang akan dipublikasikan dalam Jurnal Ketahanan Nasional. Adapun target capaian dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Target Capaian Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
			TS 2020
1	Publikasi ilmiah	Internasional	Tidak Ada
		Nasional	Ada
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak Ada
		Nasional	Ada

3	<i>Inivited speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak Ada
		Nasional	Tidak Ada
4	<i>Visiting Lecturer</i>)	Internasional	Tidak Ada
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	Tidak Ada
		Paten sederhana	Tidak Ada
		Hak Cipta	Tidak Ada
		Merek dagang	Tidak Ada
		Rahasia dagang	Tidak Ada
		Desain Produk Industri	Tidak Ada
		Indikasi Geografis	Tidak Ada
		Perlindungan Varietas Tanaman	Tidak Ada
Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak Ada		
6	Teknologi Tepat Guna		Tidak Ada
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial		Tidak Ada
8	Buku Ajar (ISBN)		Tidak Ada
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Tidak Ada

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi dokumen/teks (*document studies*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Peristiwa yang menjadi pusat penelitian akan dideskripsikan tanpa ada pemberian perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pembuat kebijakan yang terlibat dalam perumusan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di wilayah provinsi Jawa Timur. Para pembuat kebijakan yang dimaksud adalah pada *top leader* yaitu gubernur, bupati, walikota, dan pihak lain yang menjalankan peran *top leader* dalam pemerintah daerah wilayah Jawa Timur. Secara spesifik akan mengkaji statement/ Pernyataan dan sikap dari Gubernur Jatim, bupati dan walikota dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik (Surabaya Raya)

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada tindakan, pernyataan lisan dan tertulis, para pembuat kebijakan daerah dalam merespon situasi pandemic covid 19 dalam konteks individual maupun kolektif. Aspek yang menjadi tema utama dalam penelitian ini adalah :

1. Inisiatif dari pembuat kebijakan dalam merespon pandemic covid.
2. Landasan berpikir pembuat kebijakan dalam memutuskan tindakan penanganan pandemi

3. Cara pembuat kebijakan dalam mendapatkan dukungan.
4. Konsistensi pembuat kebijakan dalam penanganan pandemi covid 19.
5. Kemampuan adaptasi pembuat kebijakan dengan perubahan dan konflik.

D. Teknik Pengumpulan Data

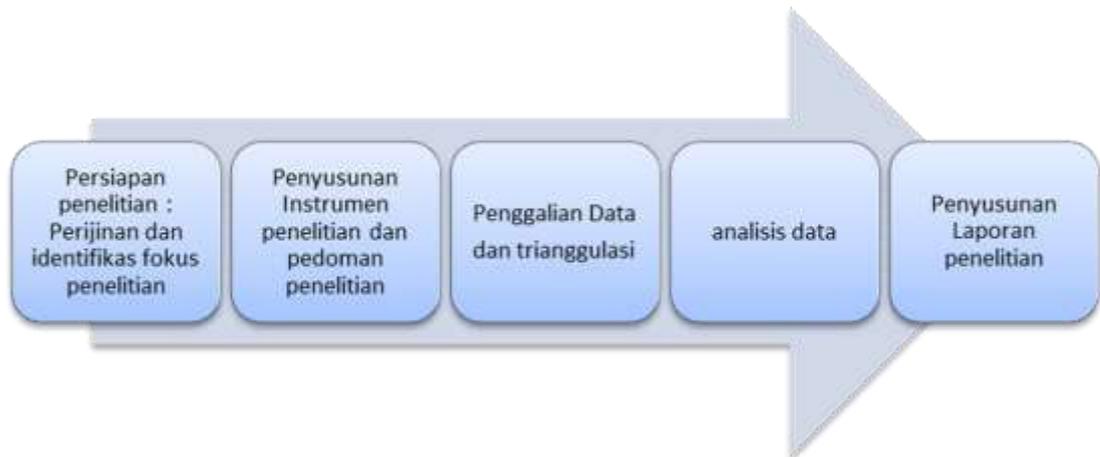
Penelitian ini adalah studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis maupun lisan berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film/berita, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang melalui rekam jejak media tentang tokoh tertentu. Oleh karena itu teknik pengumpulan data adalah dengan cara menggali jejak dokumen dari media massa. Media massa yang dimaksud adalah media cetak dan elektronik yang informasinya berupa tulisan maupun lisan.

E. Teknik Analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik dan matematik, menggambarkan persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian menarik suatu kesimpulan. Data-data diseleksi sesuai dengan tema penelitian dan ditelaah pertalian antar data, kemudian disimpulkan. Secara spesifik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana. Analisis Wacana atau Discourse analysis ialah cara atau metode untuk mengkaji hal yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik itu secara tekstual ataupun juga kontekstual. Analisis wacana juga berkenaan dengan isi pesan komunikasi yang dimana sebagian diantaranya yakni, berupa teks, naskah pidato, transkrip sidang ataupun perdebatan di forum, sidang parlemen, artikel yang termuat di surat kabar, buku, serta iklan kampanye tertentu.

F. Desain Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi persiapan, proses penyusunan instrument dan pedoman penelitian, penggalan dan pengumpulan data secara otentik, dan melakukan analisis data. Tahapan akhir dari penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Desain Penelitian dapat digambarkan pada gambar 3.



Gambar 3. Desain Penelitian

BAB 5.

HASIL YANG DICAPAI

A. Hasil

Pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) mengungkap masalah keputusan yang jelas yang dihadapi oleh pemerintah dan organisasi internasional. Pembuat kebijakan ditugasi untuk mengambil tindakan untuk melindungi populasi mereka dari penyakit, sementara kekurangan informasi yang dapat diandalkan tentang virus dan mekanisme penularannya, tentang keefektifan tindakan yang mungkin dilakukan, dan konsekuensi kesehatan dan sosial ekonomi (langsung dan tidak langsung). Keputusan kebijakan rasional akan menggabungkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia - biasanya disediakan oleh pendapat ahli dan studi pemodelan - tetapi dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah dengan cepat, yang bersangkutan bukti sangat berubah-ubah, sehingga sulit untuk menghasilkan prediksi yang didasarkan secara ilmiah hasil dari tindakan alternatif.

Mengingat konteks ini, banyak perhatian telah diberikan pada cara penanganan pembuat kebijakan ketidakpastian dalam respons COVID-19 (Lazzerini dan Putoto 2020; Chater 2020; Anderson et Al. 2020; Emanuel dkk. 2020; Hansen 2020). Pembuat kebijakan telah dihadapkan dengan sangat pandangan yang berbeda tentang skenario wabah potensial yang berasal dari ahli yang berbeda penilaian atau prediksi pemodelan yang berbeda. Dalam menghadapi ketidakpastian seperti itu, pembuat kebijakan mungkin menanggapi dengan mencoba menyeimbangkan perspektif alternatif, atau mereka mungkin sepenuhnya merangkul satu tanpa kekhawatiran bahwa ini bisa sangat keliru menggambarkan dasar pengetahuan kita yang mendasarinya (Johnson-Laird 2010). Kecenderungan untuk mengunci pada satu narasi - atau lebih umum, ini ketidakmampuan untuk menangani ketidakpastian - dapat mengakibatkan mengabaikan wawasan berharga dari alternative sumber, dan dengan demikian salah menafsirkan keadaan wabah COVID-19, berpotensi menyebabkan keputusan suboptimal dengan kemungkinan konsekuensi bencana (Chater 2020; Cancryn 2020; Rucker dkk. 2020).

Keputusan, memberikan cara yang berharga untuk meringkaskan tantangan dan ambisi kebijakan. Bahkan jika konstruksi teori keputusan pada akhirnya digunakan hanya secara informal dalam praktiknya, keduanya memberikan panduan berharga untuk pembuatan kebijakan transparan dan mengatasi ketidakpastian yang parah dengan cara yang masuk akal. Pertama, kami menguraikan kerangka kerja untuk memahami dan memandu pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian dalam konteks Pandemi covid19. Kedua, kami menunjukkan bagaimana aturan keputusan formal dapat digunakan sebagai pedoman pembuatan kebijakan dan menggambarkan penggunaannya dengan contoh penutupan sekolah. Aturan keputusan yang kami hadirkan memungkinkan pembuat kebijakan untuk menyadari bahwa mereka tidak tahu mana dari sekian banyak potensi skenario 'benar' dan bertindak sesuai dengan membuat keputusan yang hati-hati dan tegas, yang tetap berlaku untuk berbagai masa depan dan menjaga opsi tetap terbuka (Lempert dan Collins 2007). Ketiga, kami membahas arah baru untuk menentukan pendekatan yang lebih transparan mengkomunikasikan derajat kepastian dalam penemuan dan pengetahuan ilmiah sangat relevan dengan pengambil keputusan yang mengelola pandemi.

Sebagian besar negara tidak siap dengan kecepatan dan skala dampaknya dari COVID-19. Beberapa regulasi nasional telah diproduksi oleh pemerintah di berbagai tingkatan dari presiden hingga tingkat menteri selama Januari – Maret 2020. Tabel 1 (diurutkan secara kronologis) merangkum peraturan dan regulasi yang dibuat untuk memandu respons nasional dan lokal di Indonesia. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar regulasi tersebut dikeluarkan setelah 13 Maret ketika Presiden membentuk Satgas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diangkat sebagai komandan. Sebelum Keputusan ini, respon tingkat nasional sangat minim yang ditunjukkan dengan hanya dikeluarkannya dua peraturan sektoral. Pertama adalah Deklarasi Kementerian Kesehatan tentang Novel 2019-nCov sebagai penyakit yang menguraikan potensi transformasi COVID-19 menjadi wabah dan apa yang bisa dilakukan pada 4 Februari 2020. Kedua, deklarasi nasional mengenai situasi darurat spesifik COVID-19 oleh Kepala BNPB pada 28 Februari 2020.

a. Persepsi, Mekanisme Kerja, dan Orientasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa menyerahkan semua kebijakan penanganan Covid -19 kepada pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian informasi dari pusat sehingga tidak membuat bingung masyarakat di daerah. Demikian ditegaskan Khofifah menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Covid -19 yang masuk ke Indonesia. "Biarlah itu menjadi otoritas pusat. Agar nantinya informasi menjadi pasti dan tidak membuat masyarakat takut," ujar Ketua Umum Muslimat tersebut. Khofifah menilai kebenaran informasi tentang Corona menjadi sangat sensitif. Jika salah menyampaikan akan membuat masyarakat takut, hingga kemudian membatasi diri dalam pergaulan dan aktivitas. "Jangan sampai informasi tentang Corona ini membuat panik masyarakat, hingga kemudian masyarakat takut untuk ke mall, mengantar anak sekolah, kerja atau bergaul karena takut tertular Corona," lanjut Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Sejauh ini menurut Khofifah, Jatim sudah siap untuk penanganan Covid -19. Rumah sakit milik Pemprov Jatim telah menyiapkan ruang isolasi dan perawatan jika ada yang positif terkena Corona. "Secara khusus Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemprov Jatim seperti Dr Sutomo Surabaya, Syaiful Anwar Malang ataupun Soedono Madiun telah menyiapkan penanganann. Termasuk ruang isolasi dengan standart internasional," ujar Khofifah. Menyinggung tentang warga Jatim yang menjadi awak kapal pesiar Diamond Princess maupun Dream World, Gubernur Jawa Timur tersebut mengakui ada. Sejauh ini semuanya masih menjalani orientasi dan masa karantina. Namun demikian pihaknya tidak mau membuka identitas ke publik. "Saya sudah mendapatkan laporan tentang warga Jatim yang menjadi ABK di Dream World dan Diamond Princess. Sejauh ini mereka sehat namun terus dalam pantauan hingga nanti kembali ke tempat asalnya," pungkas Khofifah.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pencegahan penanggulangan covid-19 meliputi :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur.

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur.
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/Kpts/013/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik.
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya.
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo.
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo.
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/Kpts/013/2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik
8. Buku Panduan Covid-19
9. Buku Pedoman PSPB.

b. Persepsi, Mekanisme Kerja, dan Orientasi Pemerintah kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menyiapkan tim baru penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi seiring Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Pak Sekda sudah saya minta bentuk. Kita tetap bentuk tim karena tidak mungkin kalau Dinas Kesehatan bekerja sendiri. Jadi kita tetap bentuk tim, tapi belum tahu apa namanya nanti," ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) di Balai Kota Surabaya, Selasa, (21/7/2020), seperti dikutip dari Antara. Dia menuturkan, selain mengacu pada Peraturan Presiden

(Perpres) RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pembentukan tim ini dinilai penting untuk saling menyamakan persepsi.

Selain itu, lanjut dia, koordinasi terkait penanganan COVID-19 yang selama ini telah berjalan tetap sama seperti halnya dalam memutuskan suatu protokol kesehatan di pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, Risma menuturkan, tim tersebut merupakan gabungan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. "Supaya koordinasinya tetap sama. Jadi nanti misalnya memutuskan sesuatu, misalkan protokol di mal itu ya, tetap ada tim inti dari Bakesbang, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan," tutur dia. Risma menyebut sebelum melangkah atau memutuskan suatu kebijakan, tim tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari berbagai sisi aspek seperti halnya di pusat perbelanjaan, harus ada pertimbangan dari sisi pengaturan pengunjung hingga transaksi pembelian. "Jadi tidak sendiri, maksudnya kalau dilihat dari sisi perdagangan, dia mungkin atur transaksi saja. Tapi kalau dengan tim, maka diatur misalkan caranya antrre kalau di dalam penuh, antrenya bagaimana di luar begitu," kata dia.

Meski demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu, menyatakan dalam pembentukan tim nanti, pihaknya tetap menggandeng jajaran TNI dan Polri. Hal itu berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kota Surabaya dinilai penting. "Kita selama ini tetap libatkan (TNI dan Polri, red.), sistem baru kita libatkan itu. Karena sebelumnya pun kita sudah begitu, sebelumnya tetap kita juga lakukan seperti itu," tutur dia. Terkait kondisi ekonomi di Surabaya, Risma menjelaskan bahwa kondisi roda perekonomian di "Kota Pahlawan" mulai berjalan baik. Tentunya, ke depan pihaknya akan terus melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan kondisi perekonomian di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu. "Kalau ekonomi rasanya masing-masing sudah mulai jalan. Jadi evaluasi misalkan kemarin kayak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bisa diangsur. Termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga sudah kita atur bagaimana pembayarannya," ujar dia. Ketika ditanya kapan tim itu mulai berjalan, Wali Kota Risma menyatakan, saat ini sedang membahas dan telah menginstruksikan Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan untuk pembentukan

tim tersebut. "Sekarang masih dibahas, tapi yang jelas kita tetap koordinasinya sebagai tim," kata dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan peraturan wali kota (perwali) Nomor 33 Tahun 2020 pada 13 Juli 2020. Perwali ini tentang perubahan atas perwali Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada perubahan perwali tersebut, ada tambahan satu pasal yaitu mengenai pembatasan jam malam. Pembatasan jam malam itu dimuat dalam pasal 25A. Isi pasal tersebut antara lain seperti dikutip dari Perwali Nomor 33 Tahun 2020 pada Rabu, 15 Juli 2020:

1. Pembatasan aktivitas di luar rumah dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB.
2. Pembatasan aktivitas di luar rumah dikecualikan untuk kegiatan pemenuhan keperluan kesehatan antara lain rumah sakit, apotek, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, stasiun, terminal, pelabuhan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jasa pengiriman barang, dan minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
3. Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang yang melakukan aktivitas di luar rumah harus menunjukkan surat keterangan dan bukti pendukung lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Ketentuan jam operasional kegiatan yang telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan wali kota mengikuti ketentuan jam operasional yang diatur dalam peraturan wali kota ini.

Selain itu, Pemkot juga mengubah pasal 34 terkait sanksi. Pasal 34 berbunyi antara lain:

1. Wali kota mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan wali kota ini.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis.
3. Kemudian paksaan pemerintahan yang meliputi penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara, dan paksaan pemerintah

lainnya berupa push up, joget, memberikan makan orang dengan gangguan jiwa (OTGJ) di Liponsos. Selain itu, pencabutan izin.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona di Kota Pahlawan. Bentuk perlawanan Risma terhadap Covid-19 salah satunya membuat bilik sterilisasi tubuh. Ide pembuatan bilik sterilisasi itu dimulai ketika Risma mengikuti perkembangan kasus corona di dalam dan luar negeri. Institut Teknologi Telkom Surabaya menangkap respons Risma dan bergerak cepat membuat membuat alat itu. Di samping itu, Risma juga membuka posko pengaduan Covid-19 dan dapur umum untuk warga Surabaya agar tetap aman dan sehat. Upaya lain yang dilakukan Risma untuk melindungi warga Surabaya dari Covid-19, di antaranya membuat ratusan wastafel, melakukan sterilisasi di seluruh sekolah, membuat situs Lawan Covid-19 sebagai ruang konsultasi hingga mengampanyekan pentingnya social distancing. Berikut fakta selengkapnya:

- a. Bilik sterilisasi Sabtu (21/3/2020), Risma menerima dua contoh bilik sterilisasi atau sterilization chamber yang dikembangkan Institut Teknologi Telkom Surabaya di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya. Dua tipe bilik sterilisasi itu, yakni tipe chamber (ruangan) dan tunnel (terowongan). Alat tersebut diklaim bisa menekan laju penyebaran virus corona atau Covid-19. Risma mengatakan, sebenarnya sudah banyak yang membuat bilik sterilisasi seperti yang dikembangkan IT Telkom Surabaya. Bahkan, ada yang membuat seperti tenda dan tempat cuci mobil. "Jadi, ini lebih sempurna ketimbang cuci tangan. Kalau cuci tangan kan hanya membersihkan virus dan kuman yang ada di tangan, tapi kalau seperti ini kan bisa seluruh badan," kata Risma. Ia menyampaikan, bilik sterilisasi ini masih terus disempurnakan, termasuk cairan yang dibuat Dinas Kesehatan Kota Surabaya. "Bilik-bilik semacam ini akan kami bikin sebanyak-banyaknya. Dinas Cipta Karya juga baru bikin semacam ini," tegas dia. Saat ini, bilik sterilisasi tersebut sudah diproduksi massal. Pemkot Surabaya menargetkan membuat 10 unit bilik setiap harinya. Bahkan, dua bilik sterilisasi yang dibuat Dinas Cipta Karya Surabaya sudah dipasang di terminal kedatangan domestik maupun internasional Bandara Juanda Surabaya. Setiap pengunjung yang berada di terminal kedatangan domestik maupun internasional, akan melewati proses screening melalui bilik

sterilisasi tersebut. Pemerintah Kota Surabaya membuka posko dan dapur umum pasca terdapat 6 pasien di Surabaya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Rabu (18/3/2020). Lihat Foto Pemerintah Kota Surabaya membuka posko dan dapur umum pasca terdapat 6 pasien di Surabaya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Rabu (18/3/2020).(Dok. Pemkot Surabaya)

- b. Posko pengaduan dan dapur umum Halaman Balai Kota Surabaya berubah menjadi posko pengaduan Covid-19 dan dapur umum. Posko didirikan untuk mengkoordinasi penyemprotan disinfektan ke berbagai titik di Kota Surabaya. Sementara dapur umum dibuat untuk menyediakan minuman pokok yang terdiri dari jahe dan rempah-rempah lainnya serta telur rebus. Minuman dan panganan itu dibagikan ke rumah-rumah warga setiap hari agar imunitas tubuh mereka tetap terjaga. "Pengiriman pokok dan telur rebus ini akan terus dilakukan ke berbagai titik yang padat penduduk. Jadi, yang didahulukan itu ke lokasi yang padat penduduk," kata Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto. Risma mengatakan, dapur umum dibuat untuk mengedukasi warga Kota Surabaya agar mereka juga selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. "Jadi kita buat itu (dapur umum). Putih telurnya punya protein untuk daya tahan tubuh. makanya kita pakai telur, bukan hanya jamu yg kita buat. Kemudian jahe sama serai itu juga ada curcumin yang bisa untuk ketahanan tubuh," kata Risma, di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Sabtu (21/3/2020). Minuman dan panganan itu langsung dibagikan ke warga melalui petugas di setiap kelurahan. "Itu dibagi ke kelurahan, biar enggak numpuk di sini. Biar aku enggak disemprit. kemarin di kelurahan aja ada yang semprit, karena numpuk," kata Risma
- c. Membuat ratusan wastafel Pemerintah Kota Surabaya sudah membuat ratusan wastafel yang diletakkan di berbagai fasilitas publik di Surabaya. Risma mengatakan, jumlah wastafel portable yang sudah dipasang ada sebanyak 539 unit hingga Sabtu kemarin. Ia pun akan menambah jumlah wastafel yang akan dipasang di ruang-ruang publik agar masyarakat mulai mengubah perilaku secara mendasar, membiasakan cuci tangan secara rutin. "Saya pikir ini bagus. Kita harus biasakan itu (cuci tangan), jadi kita akan terus. Totalnya sudah ada 539 wastafel, kita akan perbanyak terus

untuk warga biasakan cuci tangan pakai sabun," ujar Risma. Dalam sehari, Dinas Cipta Karya Surabaya telah memasang lebih dari 10 unit wastafel. Beberapa sekolah juga setidaknya dipasang lebih dari satu wastafel agar ketika digunakan tidak antre panjang.

- d. Sterilisasi sekolah Pemerintah Kota Surabaya memperpanjang masa belajar di rumah bagi pelajar Kota Surabaya, mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP sederajat pada 23-28 Maret 2020. Selama masa libur, Risma melakukan sterilisasi semua sekolah yang ada di Kota Surabaya. "Kami perpanjang dua minggu karena saya juga butuh untuk menyiapkan, kalau nanti mereka masuk sudah steril. Kami akan sterilkan seluruh sekolah," kata Risma. Menurut Risma, ada sebanyak 1.262 SD dan SMP di Surabaya yang akan disterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, sekolah dengan jumlah siswa banyak akan ditambah dengan memasang wastafel portable supaya lingkungan sekolah benar-benar steril. "Sebanyak 1.262 sekolah nanti akan dipasang wastafel dan kami bagi hand sanitizer. Nanti semua sekolah juga akan disemprot disinfektan, sehingga ketika nanti mereka masuk sekolah, semuanya sudah bisa steril," tutur Risma. "Jadi, kami tambah seminggu lagi, sambil kami punya waktu untuk disinfektan sekolah-sekolah," ujar Risma menambahkan.
5. Kampanye social distancing Dalam beberapa hari terakhir ini, Risma terlihat langsung memberikan sosialisasi tentang pembatasan sosial di jalanan Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memang telah menerapkan pembatasan sosial atau social distancing untuk mencegah laju penyebaran virus corona di Surabaya. Menggunakan mobil dan pengeras suara, Risma berkeliling kota sambil menyampaikan pesan agar warga yang berkerumun di ruang-ruang publik bisa jaga jarak minimal 1 meter antara satu orang dengan orang lain. Social distancing ini sudah diterapkan Risma dalam beberapa waktu terakhir. Cara itu dinilai penting karena bisa meminimalisasi kontak yang terlalu dekat, sehingga satu sama lain tidak terpapar cipratan cairan sistem pernapasan orang lain. "Sakjane nggilani, koyok zaman kemerdekaan mbiyen ae. (Sebenarnya menjijikkan, seperti zaman kemerdekaan saja). Tapi gimna, karena banyak warga yang enggak tahu pentingnya social distancing," kata Risma di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Minggu (22/3/2020). Berbagai pusat keramaian sudah

dikunjungi Risma untuk mengampanyekan pentingnya social distancing, seperti Pasar Keputran, Pasar Wonokromo, Pasar Pakis, dan sejumlah tempat keramaian lainnya. Setiap ada warga yang berkerumun di jalan, Risma juga berteriak menggunakan pengeras suara untuk saling jaga jarak. Tidak hanya di kawasan perkotaan, kampanye social distancing juga dilakukan di kampung-kampung. "Kalau di kampung-kampung yang melakukan (pegawai) kelurahan sama kecamatan. Di kampung-kampung, suaraku yang disetel, orang-orang pada lari semua," ujar Risma. Cara Risma itu mendapatkan respons positif dari masyarakat Surabaya. "Banyak yang senang ya? Kayak zaman baheula, katanya zaman media sosial, kok (kampanye) seperti zaman kemerdekaan," kelakar Risma.

B. Pembahasan

a. Konstruksi Pengetahuan Kedaruratan Covid 19

Pembuat kebijakan mengandalkan informasi ilmiah dan teknis untuk menginformasikan dan melegitimasi keputusan. Ketergantungan ini telah berkontribusi pada citra sains yang berbeda dari emosi, sementara emosi memunculkan citra spontanitas atau irasionalitas. Gambar emosi ini mempengaruhi perannya dalam proses kebijakan, seringkali menempatkannya dalam apa yang dipahami sebagai "Bidang emosional kehidupan", seperti rumah, situasi intim, dan perasaan pribadi (Batu 2013). Namun, emosi adalah bagian dari proses kebijakan dan digunakan secara strategis untuk membentuknya tanggapan kebijakan publik dan dampaknya pada masyarakat (Durnová 2019).

Pemerintah menarik emosi untuk membantu melegitimasi tanggapan kebijakan dan mengarahkan public reaksi Kami melihat pejabat pemerintah mengacu pada 'ketakutan' akan penyebaran cepat COVID19, sama seperti kami mengamati penekanan pada 'kepercayaan' pada sesama warga untuk mematuhi langkah-langkah kebijakan. Kami melihat referensi ekstensif untuk "kecemasan" terkait kesehatan yang tidak mencukupi sumber daya untuk mengatasi pandemi, tentang isolasi sosial, dan tentang umum ketidakpastian tentang berapa lama semua ini akan berlangsung. Memang, pembuat kebijakan tampaknya telah melegitimasi pilihan kebijakan mereka melalui kebutuhan emosional warga negara melalui persepsi bukti ilmiah "objektif".

Bahasa bermuatan emosional dapat mengingat konteks budaya dan sejarah. Kecemasan seputar COVID-19 hingga kecemasan seputar konflik geopolitik besar. Respons kebijakan memaksa evaluasi ulang bidang emosional dalam masyarakat. Kebijakan tanggapan terhadap pandemi telah menyebar ke seluruh masyarakat, termasuk ke dalam rumah dan kehidupan warga negara. Penguncian nasional, misalnya, telah meningkatkan kebutuhan homeschooling, perawatan diri sebagai tanggapan atas isolasi yang lama, dan kebutuhan akan konsultasi psikologis.

Berbagai bidang penelitian dalam ilmu kebijakan telah mengakui bahwa pembelajaran berperan penting dalam kemampuan kita untuk memahami, memengaruhi, dan menangani masalah kebijakan yang kompleks. Literasi dapat memunculkan isu-isu baru, menantang keyakinan yang dipegang sebelumnya, dan membantu mengidentifikasi respons kebijakan yang inovatif. Dalam demokrasi, proses yang memfasilitasi pembelajaran, seperti dialog pemangku kepentingan, sering kali dihargai karena potensinya untuk membawa berbagai bentuk pengetahuan — baik ilmiah, pengalaman, atau berbasis nilai — ke dalam pengambilan keputusan kebijakan. Mengingat pentingnya pembelajaran, dan tantangan yang terkait dengannya, banyak sarjana telah berusaha untuk mendiagnosis pembelajaran dalam konteks kebijakan (Heikkila dan Gerlak 2013; Moyson dkk. 2017), termasuk belajar di sekitar krisis (Crow et al. 2018).

Urgensi memicu pembelajaran dari pengalaman orang lain Pandemi menggambarkan pembelajaran intra-krisis, termasuk bagaimana para ahli dan pembuat keputusan terus menerus meninjau dan memperbarui tanggapan kebijakan saat pengetahuan baru tersedia (Moynihan 2008). Jeda waktu antara pengalaman negara dengan COVID-19 — terutama di masyarakat yang terkena awal, termasuk China dan Italia — memberi negara lain kesempatan untuk memantau pandemi dan mengevaluasi tanggapan kebijakan, sebagai dasar tanggapan mereka sendiri. Kami juga melihat bukti pembelajaran di berbagai domain dan skala pembuatan kebijakan: dari pemimpin local yang belajar dari lembaga kesehatan masyarakat tentang tingkat dan dampak virus di komunitas mereka, kepada orang tua yang saling belajar cara menghasilkan pendidikan anak-anak mereka bersama dari sekolah (Darling-Hammond 2020). Pembelajaran terwujud dalam berbagai cara. Pembelajaran dapat mengambil

berbagai bentuk: sebagai pembaruan bagi kami pemahaman tentang aspek instrumental atau teknis dari masalah kebijakan, sebagai perubahan pada kami keyakinan atau nilai kebijakan yang mendasari tentang prioritas masyarakat dalam menanggapi masalah, dan sebagai perubahan mendasar pada institusi yang menargetkan masalah ini. Pembelajaran instrumental seputar COVID-19, misalnya, telah terjadi mengenai berapa lama virus dapat bertahan di permukaan, yang menyebabkan penutupan banyak bangunan publik dan pribadi. Mempengaruhi nilai, orientasi, krisis COVID-19 telah membawa perhatian pada dilema sosial yang mendasari itu membuat orang lebih rentan terhadap virus, atau rentan terhadap upaya untuk menghentikannya.

Hambatan berbeda menghambat pembelajaran Dalam kasus pandemi COVID-19, pembelajaranlah berpotensi dibatasi oleh beberapa masalah: kesegeraan dan urgensi krisis, popular tuntutan untuk tindakan paksa, keterbatasan dalam pengetahuan teknis, dan politisasi (Stern 1997). Ini menimbulkan pertanyaan apakah kita mempelajari hal yang benar dan apakah orang yang tepat sedang belajar. Banyak dari pilihan kebijakan kami mencerminkan "memori otot" dari masa lalu untuk membimbing kita melewati krisis sampai kita bisa berhenti sejenak dan merenung, membiarkan lebih dalam bentuk pembelajaran. Dengan COVID-19, pengawasan dalam tagihan bantuan, sebagian dibangun dari persepsi tentang kekurangan paket stimulus 2008 (Woodruff 2020). Namun, hal baru COVID-19 mungkin juga mencegah kesempatan belajar dari masa lalu untuk membimbing kita (Brändström et al. 2004). Pada saat yang sama, dalam menghadapi krisis kita mungkin lebih cenderung untuk melihat kepada mereka yang paling seperti kita, secara politik dan ideologis, untuk pelajaran. Pendekatan yang berbeda untuk kebijakan penguncian yang berhubungan erat dengan ideologi politik (Adolph et al. 2020).

b. Konsistensi Penanganan Kedaruratan Covid

Berputar-putar di sekitar semua keputusan kebijakan dan implementasinya adalah jaringan kebijakan (Marsh dan Rhodes 1992; Jenkins-Smith dkk. 2018), umumnya didefinisikan sebagai entitas yang berusaha memengaruhi kebijakan, hubungannya, dan hasil terkait. Jaringan kebijakan mencakup politik partai, badan publik, kantor terpilih, kelompok kepentingan, organisasi non-

pemerintah, akademisi, lembaga think tank, dan banyak lagi. Entitas ini berhubungan satu sama lain melalui suatu variasi hubungan penting dalam pembuatan kebijakan, seperti pertukaran informasi dan sumber daya, kolaborasi, kepercayaan, dan hubungan sekutu / musuh. Jaringan kebijakan bereaksi dan berkontribusi pada pengalihan perhatian ke masalah kebijakan dan Perubahan agenda pemerintah Pandemi COVID-19 menandakan tiba-tiba dan drastis pergeseran dalam masalah apa yang menjadi perhatian jaringan kebijakan dan, oleh karena itu, perubahan dalam agenda banyak tempat pengambilan keputusan pemerintah, seperti badan legislatif dan parlemen.

Dengan menggeser fokus pada masalah kebijakan dan mengubah agenda, ada juga perubahan dalam konflik kebijakan dan dalam hubungan antar masyarakat. di sisi yang berbeda dari masalah kebijakan. Misalnya, jaringan kebijakan dalam konteks COVID19 lebih fokus pada tujuan fundamental dari bidang masalah kebijakan, apakah itu adalah untuk mendidik anak-anak atau mengirimkan makanan ke toko grosir, dan lebih sedikit pada masalah-masalah sekunder pentingnya. Jaringan kebijakan sebelumnya mengkondisikan kebijakan dan tanggapan masyarakat. Banyak tanggapan diamati dalam COVID-19 mencerminkan kerentanan dan kekuatan jaringan kebijakan sebelumnya, serta hubungan yang muncul (Bodin et al. 2019). Misalnya yang stabil dan tahan banting jaringan kebijakan yang mencakup pemerintah nasional dan daerah memiliki kontribusi pada respons pandemi yang lambat di negara itu. Namun, respon lambat Indonesia juga telah dikaitkan dengan sistem pemerintahan berbasis konsensus dan desentralisasi, yang membutuhkan waktu untuk menyelaraskan tindakan top-down dengan kesadaran yang berkembang. dan ketakutan di antara orang-orang.

Perubahan dalam pentingnya orang dan organisasi jaringan kebijakan, hubungan, dan sumber daya Setelah ditetapkan, jaringan kebijakan telah terbukti relatif stabil (pada paling tidak dalam representasi organisasi), dengan pola interaksi yang diatur (JenkinsSmith et al. 2018). Beberapa dari jaringan kebijakan ini telah diubah setelah Tanggapan COVID-19. Ini termasuk membuat beberapa hubungan menjadi superfujif dan yang lainnya penting, meningkatkan sentralitas beberapa entitas (seperti otoritas publik dan pakar), dan mendorong entitas lain ke pinggiran (seperti partai politik dan asosiasi).

c. Mekanisme Integratif Penanganan Kedaruratan Covid 19

Kebijakan publik tidak berlaku sendiri; sebaliknya, tindakan administratif menjembatani pemerintah niat untuk melakukan sesuatu (kebijakan) dan dampak dunia nyata dari niat itu. Krisis seperti pandemi COVID-19 menuntut tindakan cepat dan terkoordinasi yang beradaptasi secara lancar dengan kondisi— "koordinasi kontingen" dalam kata-kata Kettl (2003). Koordinasi seperti itu umumnya mencakup lembaga yang berbeda dan lintas tingkat pemerintahan. Selanjutnya, sebagai devolusi dan privatisasi layanan publik telah menggeser fungsi administratif penting menjadi berbeda entitas baik di dalam maupun di luar pemerintah, tanggapan kebijakan bahkan untuk keadaan darurat sederhana memerlukan tindakan bersama antara organisasi pemerintah, organisasi nirlaba, perusahaan pencari laba, dan individu. Setiap aspek implementasi membentuk bagaimana kebijakan publik diambil menempatkan "di atas tanah" —dari cara administrator menafsirkan arahan kebijakan hingga ke caranya personel garis depan mengoperasikannya.

Fragmentasi administratif dan desentralisasi mempersulit pelaksanaan Respons pandemi memerlukan kolaborasi antarlembaga lintas struktur birokrasi yang terfragmentasi dan budaya organisasi yang khas. Di AS, misalnya, Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) membutuhkan akses ke Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan yang kritis (HHS) informasi, sambil mengarahkan lembaga seperti Korps Insinyur Angkatan Darat untuk mengatur up infrastruktur medis darurat dan Departemen Perhubungan untuk memelihara rantai pasokan. Sementara itu, para administrator di pemerintahan negara bagian, lokal, dan kesukuan memperhatikan lembaga seperti HHS dan FEMA untuk arahan dan bantuan. Meskipun tujuannya adalah koordinasi hierarkis yang efisien, perebutan kekuasaan antar tingkat pemerintahan sama saja kemungkinan besar (Lester dan Krejci 2007). Administrator menghadapi tantangan tambahan dalam berkoordinasi dengan organisasi nirlaba dan profesional mitra. Tidak adanya mekanisme kontrol formal, mereka harus memanfaatkan tindakan tidak langsung. Misalnya, administrator telah menyusun komitmen yang kredibel dengan organisasi for-profit dan nonprofit rumah sakit untuk mendorong mereka melupakan pendapatan operasi elektif (dengan membatalkan prosedur), yang menciptakan kapasitas tambahan untuk pengobatan pasien COVID-19. Ketergantungan pemerintah pada lembaga

nonprofit tidak hanya untuk memberikan layanan publik yang penting, tetapi juga mensubsidi pendanaan pemerintah dari mereka, terlihat sepenuhnya di tengah krisis. Nonprofits melihat permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk layanan mereka sambil menghadapi implikasi finansial dari dampak pandemi terhadap perekonomian. Pekerja lini depan menjalankan kebijaksanaan dan pengaturan sendiri Personil lini depan mengandalkan keluasaan untuk mengembangkan rutinitas, norma, dan strategi kreatif sebagai sarana untuk mengatasi sering kali tanggung jawab yang tidak masuk akal diberikan kepada mereka (Hupe 2013). Heuristik dan solusi sangat relevan dalam pandemi. Contohnya termasuk kisah tragis dari kerangka kerja triase yang direvisi yang diterapkan dokter untuk mengelola jumlah pasien yang terinfeksi secara mengejutkan dan solusi yang dirancang oleh staf rumah sakit untuk mengatasi kekurangan peralatan medis penting, dari masker wajah hingga ventilator.

Produksi bersama membutuhkan penanganan tantangan aksi kolektif. Pandemi menyerukan produksi bersama warga (Voorberg et al. 2015) dalam realisasi tujuan kebijakan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekomendasi “jarak sosial” dan perintah “tinggal di rumah” meminta penghuni untuk mengesampingkan kepentingan pribadi — dari kenyamanan interaksi kelompok hingga yang kritis keinginan untuk keamanan finansial — untuk mengurangi penyebaran virus dan "menggempukkan kurva". Karena banyak kebijakan semacam itu bersifat sukarela, pengungkit untuk mendorong kepatuhan dengan mereka mewajibkan pegawai negeri untuk menemukan cara untuk mengaktifkan rasa kewarganegaraan warga untuk mematuhi dan bersosialisasi. Upaya semacam itu kemungkinan besar akan lebih efektif jika memanfaatkan legitimasi rakyat dipegang oleh perantara, dari organisasi sipil hingga perusahaan nirlaba, untuk menggunakan normative tekanan menuju kepatuhan.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Lasswell (1956a) membayangkan ilmu kebijakan menjadi relevan dan tepat waktu. Di dalam semangat, komentar ini menarik refleksi langsung berdasarkan perspektif yang berbeda ilmu kebijakan untuk memahami pandemi COVID-19. Pandemi ini menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebutuhan segera untuk tindakan, rentang global, dan besarnya dampak. Kami menulis ini pada saat pandemi belum mencapai puncaknya; karenanya, kami melanjutkan pengamatan awal dalam upaya bersama untuk menawarkan wawasan tentang cara-cara di mana saintific dan keahlian teknis, emosi, dan narasi serta pesan melegitimasi keputusan kebijakan dan membentuk hubungan antara warga negara, organisasi, dan pemerintah. Kami mendemonstrasikan berbagai proses adaptasi dan perubahan, termasuk pembelajaran, lonjakan kebijakan tanggapan, pergeseran jaringan secara lokal dan global, penerapan dan administrasi kebijakan dalam menanggapi masalah lintas batas, dan menilai keberhasilan dan kegagalan kebijakan.

Ada juga aspek ilmu kebijakan yang belum dipelajari yang perlu mendapat perhatian lebih setelah pandemi COVID-19. Ini termasuk (tetapi tidak terbatas pada) jalan penelitian berikut:

1. Tanggapan politik terhadap pandemi telah mengubah prioritas dan, dengan demikian, fokus dan intensitas konflik kebijakan, tetapi karakteristik dan permanen perubahan ini tetap tidak diketahui.
2. Meningkatnya ketergantungan pada keahlian ilmiah dan teknis dalam membuat keputusan kebijakan menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas politik dalam pembuatan kebijakan.
3. Pandemi telah memperbarui perhatian pada pentingnya, dan betapa sedikit yang kita ketahui tentang, belajar di bawah tekanan dan urgensi di tengah krisis.
4. Mengingat kebutuhan untuk menghubungkan tanggapan massa dan keputusan kebijakan, pandemi memperkuat kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman baik dalam pembuatan bersama kebijakan publik dan produksi bersama.

5. Meskipun kita tahu nilai-nilai dasar dan orientasi lain mendorong keberhasilan dan kegagalan kebijakan, pertanyaan tetap tentang bagaimana menangani pertukaran di antara pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Jonatan A. Lassa, Akhilesh Surjan, Mely C. Anthony, Rohan Fisher, "Measuring political will: An index of commitment to disaster risk reduction", *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Volume 34, Maret 2019, hal 64-74.
- [2]. https://style.tribunnews.com/amp/2020/05/31/update-virus-corona-nasional-31-mei-25-ribu-kasus-jawa-timur-dan-dki-jakarta-tertinggi-kasus-baru?page=2&_ga=2.133387022.1235223969.1590913168-437861055.1516671411
- [3]. Post, L.A., Raile, A.N.W and Raile, E.D. 2010, Defining Political Will, *Politics and Policy*, Vol 38, No. 4
- [4]. Oxford Political Dictionary. 2000
- [5]. Brinkerhoff, D.W. 2010. "Unpacking the concept of political will to control corruption", U4 Policy Brief, Bergen: Chr. Michelsen Institute and Fritzen, S. 2006. "Beyond 'political will': how institutional context shapes the implementation of anti-corruption policies", *Policy and Society*, Vol 24, No. 3
- [6]. Anke Hassel, Public Policy, dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Second Edition), 2015
- [7]. Malena, C. 2009. *From political wont to political will: building support for participatory governance*, https://styluspub.presswarehouse.com/resrcs/chapters/1565493117_excerpt.Pdf
- [8]. Brinkerhoff, D.W. 2000. Assessing political will for anti-corruption efforts: an analytic framework, *Public Administration and Development*, Vol. 20, No. 3
- [9]. Craig Charney, *Political Will: What is it? How is it Measured?*, (New York: Charney Research, 2009)
- [10]. Derick W. Brinkerhoff, State-Civil Society Networks For Policy Implementation In Developing Countries dalam *Review of Policy Research*, Volume 16, Issue 1, pages 123-147, March 1999.

LEMBAR PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul

POLITICAL WILL PEMBUAT KEBUAKAN DAERAH DALAM PENANGANAN
MASALAH PANDEMI COVID 19 MELALUI PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DI JAWA TIMUR

Dengan peneliti berikut

Maya Mustika Kartika Sari, S. Sos. MIP.	0014057403
Prof Warsono, M.S	0019056003
Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si	0025086704
Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si	0016087208

Telah dipaparkan pada tanggal 14 Nopember 2020 di LPPM Universitas Negeri Surabaya
dengan menggunakan Meet Google

Catatan:

1. Kendala Perhi dituliskan
2. Data perhi disusun secara sistematis
3. Simpulan perhi terfokus

Surabaya, 14 Nopember 2020
Reviewer,



Dr. Sueeng Hananto, M.Si
NIP. 196403211993021001

LEMBAR PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul

POLITICAL WILL PEMBUAT KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENANGANAN
MASALAH PANDEMI COVID 19 MELALUI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DI JAWA TIMUR

.....

.....

.....

Dengan peneliti berikut

Maya Mustika Kartika Sari, S. Sos. M.IP.	0014057403
Prof. Warsono, M.S	0019056003
Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si	0025086704
Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si	0016087208

Telah dipaparkan pada tanggal 14 Nopember 2020 di LPPM Universitas Negeri Surabaya
dengan menggunakan Meet Google

Catatan:

1. Data perlu disajikan dengan kerangka penyajian yang lebih fokus pada masalah.
2. Perlu mengembangkan isu yang lebih populer dan tajam

Surabaya, 14 Nopember 2020

Reviewer,



Dr. Danang Tandyonomanu
NIP. 19710806199821002

PENGESAHAN DARI PEMBAHAS

Penelitian yang berjudul :

POLITICAL WILL PEMBUAT KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENANGANAN
MASALAH PANDEMI COVID 19 DI JAWA TIMUR

Dengan peneliti berikut:

- | | |
|---|------------|
| 1. Maya Mustika Kartika Sari, S. Sos. M.IP. | 0014057403 |
| 2. Prof Warsono, M.S | 0019056003 |
| 3. Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si | 0025086704 |
| 4. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si | 0016087208 |

Dinyatakan TELAH / BELUM DIREVISI*)

Surabaya, 20 Desember 2020
Pembahas,



Dr. Sugeng Haranto, M.Si
NIP. 196403211993021001

PENGESAHAN DARI PEMBAHAS

Penelitian yang berjudul :

POLITICAL WILL PEMBUAT KEBUAKAN DAERAH DALAM PENANGANAN
MASALAH PANDEMI COVID 19 DI JAWA TIMUR

Dengan peneliti berikut:

- | | |
|---|------------|
| 1. Maya Mustika Kartika Sari, S. Sos. M.IP. | 0014057403 |
| 2. Prof Warsono, M.S | 0019056003 |
| 3. Dr. Rr. Nani Setyowati, M.Si | 0025086704 |
| 4. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si | 0016087208 |

Dinyatakan TELAH / ~~BELUM~~ DIREVISI*)

Surabaya, 20 Desember 2020
Pembahas,



Dr. Danang Tandyonomanu
NIP. 197108061998021002

*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNESA DANA PNB
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi desk evaluasi dan pemaparan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh panitia seleksi, telah ditetapkan Penerima Pengabdian kepada masyarakat Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNB Tahun 2020;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNB Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNESA DANA PNBP TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNBP Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Dana PNBP Tahun 2020, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,


SUPRAPTO
NIP 196904021994031002 A



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBP UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBP TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
1	FISH	Administrasi Negara D3	Administrasi Negara D3	Upaya Universitas Negeri Surabaya Dalam Penanganan Covid 19 Sebagai Wujud Kampus Tanggap Darurat Bencana	Dian Arlupi Utami, S.Sos., M.AP. Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si. Noviyanti, S.AP., M.AP. Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	0025017601 0005037013 0018118901 0013068501	III/d III/d III/b III/b	S-2 S-3 S-2 S-2	P L P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
2	FISH	Administrasi Negara D3	Administrasi Negara D3	PERAN DESA DALAM PENANGGULANGAN VIRUS COVID 19 (STUDI PADA DESA KESAMBEN KECAMATAN PELUMPANG KABUPATEN TUBAN)	Gading Gamaputra, S.AP., MPA. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si.	0016068702 0013068501 0026087105 0005037013	III/b III/b III/c III/d	S-2 S-2 S-3 S-3	L P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
3	FISH	Administrasi Negara D3	Administrasi Negara D3	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Surabaya	Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Noviyanti, S.AP., M.AP.	0023097908 0026087105 0018118901	III/c III/c III/b	S-2 S-3 S-2	P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
4	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	Pengaruh Implementasi Pembelajaran Daring Terhadap Optimalisasi Capaian Belajar Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa Dalam Masa Pandemi Covid 19	Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.	0029077404 0907018601 0028047101 0025108901	III/d III/c III/d III/b	S-2 S-3 S-2 S-2	P P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
5	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Implementasi Kebijakan New Normal di Kabupaten Sidoarjo	Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si.	0023128303 0009049104 0025108901 0020049001 0907018601	III/d III/b III/b III/b III/c	S-2 S-2 S-2 S-2 S-3	P L L L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
6	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KEBIJAKAN PSBB PADA PORTAL ONLINE PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Dra. Meirinawati, M.AP. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.	0029048701 0021056804 0029077404 0020049001 0028047101	III/b IV/a III/d III/b III/d	S-2 S-2 S-2 S-2 S-2	L P P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBP UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBP TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
7	FISH	Ilmu Administrasi Negara S1	Ilmu Administrasi Negara S1	SURVEI KEPUASAN MAHASISWA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISH UNESA TERHADAP PERKULIAHAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19	Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA.	0030057606 0023128303 0029048701 0019018306 0009049104	III/c III/d III/b III/c III/b	S-2 S-2 S-2 S-2 S-2	L P L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
8	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM (FISH) UNESA TENTANG KEADAAN DARURAT/BAHAYA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Tamsil, S.H., M.H.	0014117201 0019108103 0003046209	III/c III/b III/c	S-2 S-2 S-2	P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
9	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	PENYUSUNAN PROGRAM PEMBIMBINGAN SEBAGAI SARANA PEMBAURAN BAGI NARAPIDANA ASIMILASI DEMI PENCEGAHAN COVID-19	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.	0027126003 0019067901	IV/b III/c	S-3 S-2	P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
10	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	Kebijakan Pembebasan Narapidana Dewasa Dan Anak Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Dalam Kajian Politik Hukum Pidana	Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.Hl. Vita Mahardhika, S.H., M.H	0010098105 0024058106 0009028308	III/b III/b III/b	S-2 S-2 S-2	L P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
11	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	TINJAUAN YURIDIS RELAKSASI KREDIT KONSUMTIF DI ERA PANDEMI COVID-19 BAGI DEBITUR BERPENGHASILAN TIDAK TETAP	Budi Hermono, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.	0019038002 0003018102 0018068903	III/c III/c III/b	S-2 S-2 S-2	L L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
12	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Surabaya.	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. Hananto Widodo, S.H., M.H.	0011028802 0017098801 0003067407	III/b III/b III/c	S-2 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
13	FISH	Ilmu Hukum S1	Ilmu Hukum S1	ASPEK HUKUM EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Ery Sulistyowati, S.H., M.H. Irfan Ronaboyd, S.H., M.H.	0007088801 0030076802 0029108902	III/b III/c III/b	S-2 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
14	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Ilmu Komunikasi S1	Kepuasan Mahasiswa terhadap Pemanfaatan Media Perkuliahan Daring selama Pandemi Covid 19	Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si. Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom. Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A.	0006087109 0013118303 0005078802	III/d III/b III/b	S-3 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
15	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Strategi Adaptif Pelaku UMKM di Tengah Pandemi COVID 19 (Studi Pelaku UMKM di Surabaya)	Diyah Utami, S.Sos., M.M. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si. Ardhie Raditya, S.Sos., M.A.	0023088008 0001057205 0022078205	III/c III/d III/d	S-2 S-2 S-2	P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
16	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	STRATEGI ADAPTASI PETANI KOTA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI SURABAYA	Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. Drs. Martinus Legowo, M.A.	0024097604 0001015803	III/d IV/b	S-2 S-2	L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
17	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Dampak Sosial dan Ekonomi Pemberlakuan PSBB Covid-19 bagi Kelompok Marjinal di Kota Surabaya	Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si. Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A.	0016087608 0024097604	III/b III/d	S-3 S-2	L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
18	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Persepsi Mahasiswa tentang layanan akademik dan non akademik di FISH pada kondisi pandemic covid-19	Dr. Ari Wahyudi, M.Si. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Dr. Totok Suyanto, M.Pd.	0010056510 0001037704 0003037309 0004046307	IV/c IV/b III/c IV/b	S-3 S-3 S-3 S-3	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
19	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Ilmu Komunikasi S1	KOMUNIKASI PEMBELAJARAN BERBASIS MEDIA DARING BAGI ABK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SD MUMTAZ KABUPATEN SIDOARJO	Mutiiah, S.Sos., M.I.Kom. Tsuroyya, S.S., M.A. Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom.	0213018502 0019028301 0720048401	III/b III/b III/b	S-2 S-2 S-2	P P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
20	FISH	Ilmu Komunikasi S1	Ilmu Komunikasi S1	MAKNA SIMBOL *TETEK MELEK* SEBAGAI MEDIA TOLAK BALAK PAGEBLUK COVID-19 PADA BUDAYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG	Dr. Anam Miftakhul Huda, M.I.Kom. Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A. Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si.	0731038602 0718058005 0001068804	III/c III/b III/b	S-3 S-2 S-2	L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	GoI.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
21	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	Romantisme Remaja Indonesia: Cinta, "Perjuangan Kelas" dan Kekerasan (Analisis Framing tentang Ideologi di balik FTV yang menjadi Hiburan semasa Pandemi Covid-19)	Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si.	0004098206 0015056504	III/b IV/c	S-2 S-3	P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
22	FISH	Sosiologi S1	Sosiologi S1	DISKURSUS COVID 19 DI MEDIA MASSA ONLINE (ANALISIS WACANA KRITIS TENTANG COVID 19 DI MEDIA MASSA ONLINE WWW.TRIBUNNEWS.COM)	Farid Pribadi, S.Sos., M.Sosio. Dr. Ari Wahyudi, M.Si. Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si. Ardhie Raditya, S.Sos., M.A.	0005118403 0010056510 0009077606 0022078205	III/b IV/c III/c III/b	S-2 S-3 S-3 S-2	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
23	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	Persepsi Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid 19	Dra. Ita Mardiani Zain, M.Kes. Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T. Dra. Sulistinah, M.Pd. Drs. Kuspriyanto, M.Kes.	0012096504 0006128002 0018095603 0006115506	IV/a III/c IV/c IV/b	S-2 S-3 S-2 S-2	P L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
24	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	EVALUASI HASIL PEMETAAN PERSEBARAN COVID-19 DI INDONESIA PER MARET 2020	Dr. Ketut Prasetyo, M.S. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. Dr. Muzayanah, S.T., M.T. Drs. Kuspriyanto, M.Kes.	0012056012 0028058803 0016127003 0006115506	IV/a III/b III/d IV/b	S-3 S-2 S-3 S-2	L P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
25	FISH	Pendidikan IPS S1	Pendidikan IPS S1	KAJIAN KETAHANAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DI KELURAHAN KRANGGAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19	Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Dr. Ketut Prasetyo, M.S. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc.	0005086705 0012056012 0028058803	IV/b IV/a III/b	S-3 S-3 S-2	P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
26	FISH	Pendidikan Geografi S2	Pendidikan Geografi S2	Pengembangan Media Presentasi Berbasis Audio Insert Cam Untuk Meningkatkan Keefektifan Pembelajaran Daring Disaat Pandemi Covid-19	Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Dr. Ari Wahyudi, M.Si. Dr. Totok Suyanto, M.Pd.	0003037309 0010056510 0004046307	III/c IV/c IV/b	S-3 S-3 S-3	L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNPB UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNPB TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
27	FISH	Pendidikan IPS S1	Pendidikan IPS S1	STRATEGI PENGUATAN MODAL SOSIAL BERBASIS KELUARGA DALAM PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19 DI KABUPATEN BLITAR	Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. Ali Imron, S.Sos., M.A. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.	0716118802 0008088304 0008086803	III/c III/d IV/d	S-3 S-2 S-3	P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
28	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	ADAPTASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PSBB DI PASAR PAGI PERUMTAS III DESA GRABAGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO	Dr. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si. Dr. Muzayanah, S.T., M.T. Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si. Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si.	0005097404 0016127003 0003097408 0025047408	III/c III/d III/d III/d	S-3 S-3 S-3 S-3	P P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
29	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	PERSEPSI MAHASISWA PENDIDIKAN GEOGRAFI TERHADAP MODEL MODELPEMBELAJARAN JARAK JAUH DENGAN INTERNET PLATFORMYANG DIGUNAKAN SELAMA TERJADI WABAH COVID 19	Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd. Dr. Rindawati, M.Si. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.	0004026506 0008016211 0005086705 0003037309	III/b IV/b IV/b III/c	S-2 S-3 S-3 S-3	L P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
30	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG KELILING DI KELURAHAN KEDURUS KOTA SURABAYA.	Drs. Agus Sutedjo, M.Si. Dra. Sri Murtini, M.Si. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. Dra. Sulistinah, M.Pd.	0020085904 0002116703 0003037309 0018095603	IV/a IV/b III/c IV/c	S-2 S-2 S-3 S-2	L P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
31	FISH	Pendidikan Geografi S1	Pendidikan Geografi S1	Dampak Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Self Determined, Self Regulated Dan Self Directed Learning Pada Mahasiswa Pendidikan IPS Selama Pandemi Covid-19	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. Dr. Agus Suprijono, M.Si. Katon Galih Setyawan, S.Sos., M.Sosio.	0408018801 0011016705 0016058703	III/c IV/c III/b	S-3 S-3 S-2	L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
32	FISH	Pendidikan Sejarah S1	Pendidikan Sejarah S1	EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING UNTUK MENUMBUHKAN LITERASI DIGITAL MASA DARURAT COVID-19	Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd. Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A. Drs. Artono, M.Hum. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A.	0011097203 0002058504 0004066508 0012118406	III/c III/b IV/a III/b	S-2 S-2 S-2 S-2	P L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
33	FISH	Pendidikan Sejarah S1	Pendidikan Sejarah S1	Perkembangan Pola Perilaku Mahasiswa Pendidikan Sejarah Dalam Pembelajaran Masa Covid-19	Dr. Wisnu, M.Hum. Riyadi, S.Pd., M.A. Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Drs. Sumarno, M.Hum.	0004056411 0020068601 0024126703 0024046501	IV/b III/b IV/a IV/b	S-3 S-2 S-2 S-2	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
34	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	Kebijakan dan Respon Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana Covid-19 di Surabaya tahun 2020	Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum. Thomas Nugroho Aji, S.I.P., M.Si. Corry Liana, S.Pd., M.Pd.	0002086604 0015026803 0014087303 0015048201	IV/b III/d III/a III/c	S-3 S-2 S-2 S-2	L P L P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
35	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	Survei Karakter Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah: Dampak Penerapan Heutagogy Education Masa Pandemi Covid 19	Dr. Agus Suprijono, M.Si. Riyadi, S.Pd., M.A. Drs. Artono, M.Hum.	0011016705 0020068601 0004066508	IV/c III/b IV/a	S-3 S-2 S-2	L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
36	FISH	Pendidikan IPS S2	Pendidikan IPS S2	STRATEGI PEMBELAJARAN GURU PPKn JENJANG SMP DI KOTA SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19	Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Dr. Totok Suyanto, M.Pd. Dr. Oksiana Jatiningih, M.Si. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.	0001047104 0004046307 0001106703 0012128902 0020027505	IV/a IV/b IV/b III/b III/c	S-3 S-3 S-3 S-2 S-2	L L P P P	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
37	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	BELAJAR DARI RUMAH : PERAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI SURABAYA	Dr. Oksiana Jatiningih, M.Si. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	0001106703 0012128902 0008086803 0014057403 0009118604	IV/b III/b IV/d III/c III/b	S-3 S-2 S-3 S-2 S-2	P P P P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 687/UN38/HK/PM/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FISH DANA PNBPN UNESA TAHUN 2020

PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS/JURUSAN FISH
DANA PNBPN TAHUN 2020

No.	Fakultas	Jurusan	Program Studi	Judul	Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Waktu (bln)	Dana yg disetujui (Rp.)	Skema
38	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Sinergitas Kebijakan Pemeritahan Provinsi Jawa Timur Dengan Pemeritahan Pusat Perihal Kekarantinaan Kesehatan Penanggulangan Covid 19	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si. Drs. I Made Suwanda, M.Si. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.	0019098501 0016087208 0009075708 0009118604	III/b III/b IV/a III/b	S-2 S-2 S-2 S-2	L L L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
39	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Ketahanan Keluarga dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19 di Kota Surabaya	Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A. Drs. I Made Suwanda, M.Si.	0025086704 0001047104 0020027505 0001037704 0009075708	IV/c IV/a III/c IV/b IV/a	S-3 S-3 S-2 S-3 S-2	P L P L L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
40	FISH	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1	Political Will Pembuat Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Masalah Pandemi Covid 19 di Jawa Timur	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. Prof. Dr. Warsono, M.S. Dr. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si.	0014057403 0019056003 0025086704 0016087208	III/c IV/e IV/c III/b	S-2 S-3 S-3 S-2	P L P L	Juli-Sept	7.500.000	Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan
Grand Total											300.000.000	

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

SUPRAPTO
NIP.196904021994031002